

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

2019



DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
SINTANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat diselesaikan.

LKjIP Tahun 2019 dibuat dan disampaikan sehubungan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dan Pelaporan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan gambaran konkrit atas apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 yang menyangkut keberhasilan/kegagalan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang telah disusun sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja.

Demikian LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini dibuat sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Sintang, Februari 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SINTANG**

Drs. H. A. DARMANATA, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19600203 198503 1 022

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB. I PENDAHULUAN	4
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.....	4 8
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	11
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016-2021.....	24
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	39
B. Realisasi Anggaran	49
BAB. IV PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
• Perjanjian Kinerja	
• Pengukuran Kinerja	

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Tahunan. Hal ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Kabupaten Sintang. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang melaksanakan pembangunan yang mengacu pada 6 (enam) sasaran. Capaian kinerja selama tahun 2016 menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang telah berhasil memenuhi 6 (enam) sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Sasaran startegis 1 “Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumber daya yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sintang”.
2. Sasaran startegis 2 “Penurunan beban pencemaran lingkungan”.
3. Sasaran startegis 3 “Penurunan laju kerusakan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam”.
4. Sasaran startegis 4 “Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup”.
5. Sasaran startegis 5 “Terintegrasinya dan diterapkannya pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan”.
6. Sasaran startegis 6 “Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan”.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis disebabkan adanya upaya kerja keras Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam memenuhi program-program yang dicanangkan. Meskipun demikian masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahan yang perlu disempurnakan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang di masa-masa mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan pihak-pihak terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
2. Perlu adanya penambahan mata anggaran untuk mendukung dalam proses peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam guna meningkatkan kelestarian sumber daya alam di masa yang akan datang.
3. Meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengelolaan lingkungan hidup baik pendidikan formal maupun non formal melalui pendidikan teknis dan fungsional.
4. Penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup.
5. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
6. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan.
7. Merintis pembentukan sistim pengendalian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

1. Kedudukan

Sesuai dengan Perda Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan

2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

a) Tugas Pokok

Memperhatikan Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2016, Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang adalah membantu Bupati Kabupaten Sintang dalam melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang lingkungan hidup melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan, baik dari fungsi koordinasi maupun pengawasan, mulai tahap perencanaan, dengan jalan melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kebijakan Bupati.

b) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Dinas Lingkungan Hidup;
2. Perumusan Kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup;
4. Pembinaan UPTD di Dinas Lingkungan Hidup;
5. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan , kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di Dinas Lingkungan Hidup;
6. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

7. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup;
8. Penyusunan penetapan Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup;
9. Penyusunan Analisa Jabatan;
10. Penyusunan pengawasan melekat;
11. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sintang, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program ; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan;
3. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah di pimpin oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah yang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - a. Seksi Jalan dan Lingkungan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sampah;
 - c. Seksi Sarana, Prasarana dan Angkutan;
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di pimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - d. Seksi Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3;
 - e. Seksi Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup;
 - f. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Tata Lingkungan di pimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan yang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - g. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - h. Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- i. Seksi PPS dan PH;
- 6. Bidang Pertamanan dan Pemakaman di pimpin oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - j. Seksi Pertamanan;
 - k. Seksi Penataan Pemakaman
- 7. UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup di pimpin oleh Kepala UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup yang dibantu oleh 1 (satu) Kepala Subbag Usaha UPTD Lab DLH yaitu :
 - a. Sub Bagian Usaha UPTD Lab DLH

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian/Bidang adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

Tugas Pokok : melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas yang meliputi urusan program dan keuangan, aparatur dan umum, dan perlengkapan.

Fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Lingkungan Hidup;
- c. Pengumpulan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Penghimpunan, penyusunan dan mengoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Lingkungan Hidup;
- f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- g. Pengawasan, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- h. Pendistribusian dan mengoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala bidang di Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak.

2) Bidang Tata Lingkungan

Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas dibidang Tata Lingkungan, Bidang Tata Lingkungan Mempunyai Fungsi :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau / Kepulauan dan ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilaian tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. Pelaksanaan pengawasan sumber daya alam;
- x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan;
- ff. Pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- gg. Menyusun kebijakan tentang penanganan pengaduan, penyelesaikan sengketa dan penegakan hukum lingkungan.
- hh. Melaksanakan penyelesaian masalah sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- ii. Melakukan penegakan hukum lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- jj. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah.

1) Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Tugas Pokok : melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan peningkatan kebersihan serta pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan.

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di Bidang Kebersihan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kebersihan;
- c. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja bidang kebersihan;
- d. Penyusunan kebijakan pelayanan umum di bidang kebersihan;
- e. Perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kebersihan;
- f. Penyuluhan, himbauan dan bimbingan kepada masyarakat dibidang kebersihan lingkungan;
- g. Pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA), dan tempat penampungan sementara (TPS);
- h. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam pengangkutan sampah;
- i. Pembinaan dan mengarahkan para pengumpul barang bekas (pemulung) dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat mengurangi volume sampah;
- j. Perencanaan, pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pengelolaan sampah;
- k. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam usaha pengendalian, pengolahan dan pemanfaatan sampah;
- l. Pengelolaan administrasi retribusi kebersihan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- m. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Seksi Kebersihan jalan dan lingkungan, Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Sampah, dan Seksi Sarana Prasarana dan angkutan;
- n. Penyusunan laporan tahunan dibidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- o. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;

n.

- p. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas di Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
Fungsi :
- a. Inventarisasi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bidang PPKL, PKLH serta mempelajarinya sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan membuat keputusan;
 - b. Perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang PPKL PKLH;
 - c. Perencanaan dan penyusunan program kerja Bidang PPKL PKLH sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - d. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkup Bidang PPKL PKLH serta memberikan arahan dan petunjuk agar dapat memperoleh hasil tugas yang sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
 - e. Penilaian kinerja bawahan di lingkup Bidang PPKL PKLH terhadap pelaksanaan tugas yang telah diserahkan dalam rangka peningkatan kinerja sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
 - f. Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan akibat aktivitas berbagai jenis usaha/kegiatan, pengelolaan limbah kebakaran hutan dan lahan, PETI serta bencana alam.
 - g. Pelayanan perizinan skala kabupaten yang berkaitan dengan pengelolaan limbah padat, cair, gas dan B3;
 - h. Pengawasan terhadap aktifitas pengelolaan limbah cair, limbah padat, gas dan B3 yang dilaksanakan oleh para pemegang izin lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - i. Pemantauan kualitas air, udara, dan tanah pada wilayah yang terkena dampak besar dan penting atau diperkirakan akan terkena dampak besar dan penting dari aktifitas berbagai jenis usaha/kegiatan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - j. Penyediaan informasi status kerusakan lahan akibat produksi biomassa;

- k. Pemulihan kualitas lingkungan pada wilayah yang terkena dampak dari aktifitas berbagai jenis usaha/kegiatan, kebakaran hutan dan lahan, PETI serta bencana alam.
 - l. Pemantauan dan pembinaan program strategis lingkungan serta dukungan terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan di bidang Lingkungan Hidup seperti Adipura, Adiwiyata, Proper Prokasih dll;
 - m. Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta usaha upaya pemulihannya;
 - n. Pelaporan pelaksanaan tugas berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan pertanggungjawaban, pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dngan tugas dan fungsinya.
- 5) Bidang Pertamanan dan Pemakaman
 Tugas Pokok : membantu Kepala Dinas di Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
 Fungsi :
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertamanan dan pemakaman.
 - b. Penyusunan kebijakan umum di bidang pertamanan dan pemakaman;
 - c. Penyusunan program kerja di bidang pertamanan dan pemakaman;
 - d. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberikan petunjuk serta arahan kepada Seksi pertamanan dan Seksi pemakaman;
 - e. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis dibidang pertamanan dan pemakaman;
 - f. Penyusunan laporan tahunan di bidang pertamanan dan pemakaman;
 - g. Penyiapan, penelitian dan pelaksanaan pembibitan tanaman hias dalam kota sintang;
 - h. Penyiapan bahan dan pemanfaatan secara optimal ruang kosong agar berfungsi sebagai taman kota;

- i. Pengkajian, menyediakan dan menata area pemakaman;
 - j. Pelayanan dan pengelolaan makam;
 - k. Penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi bidang pertamanan dan pemakaman;
 - l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 Tugas Pokok : melaksanakan sebagai tugas operasional Dinas Lingkungan Hidup bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.
 Fungsi :
- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Kelompok jabatan fungsional
 Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
 Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut ;

3. Data Kepegawaian dan Perlengkapan

a. Kepegawaian

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 67 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan komposisi sebagai berikut:

- (1) Dari segi kepangkatan/golongan ruang, terdiri dari:
 - a) Golongan I : 13 orang
 - b) Golongan II : 18 orang
 - c) Golongan III : 28 orang
 - d) Golongan IV : 8 orang
- (2) Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:

- a) S2 : 12 orang
- b) S1 : 18 orang
- c) D3 : - orang
- d) SLTA : 37 orang
- e) SLTP : - orang
- f) SD : - orang

(3) Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM, terdiri dari:

- a) SPAMEN/Pim II : 1 orang
- b) SPAMA/Pim III : 5 orang
- c) ADUM/Pim IV : 9 orang

(4) Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan lulus sertifikasi Auditor sebanyak 30 orang dan P2UPD sebanyak 11 orang. Dari jumlah tersebut, yang telah memegang Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 29 orang dan 1 orang masih dalam proses pengangkatan jabatan penyesuaian auditor, dengan rincian:

- a) Dalnis : 4 orang
- b) Ketua Tim : 15 orang
- c) Auditor Ahli Anggota Tim : 12 orang
- d) Auditor Penyelia : 1 orang

Adapun rincian PNS yang telah memegang Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

Dari segi jabatan struktural/Eselon sebagai berikut:

- a) Eselon II : 1 orang
- b) Eselon III : 5 orang
- c) Eselon IV : 16 orang

b. Perlengkapan

Keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas-tugas bidang lingkungan hidup di Kabupaten Sintang tentu harus didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mendukung tugas-tugas pengawasan antara lain:

- (1) Lahan kantor seluas m^2

4. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP 2019

Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan gambaran konkrit atas apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 yang menyangkut keberhasilan/kegagalan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 yang telah disusun sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja pengawasan.

12. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

1. Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, meliputi :

Peningkatan sistem fungsi Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri

- a. Kegiatan yang belum mampu terakomodir;
- b. Akreditasi Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang belum terlaksanakan;
- c. Isu – isu lingkungan yang selalu berubah;

2. Analisis Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

1. Kerusakan Sumber Daya Air/Sungai,

Masalah utama lingkungan hidup di Kabupaten Sintang adalah pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan emas tanpa izin di sepanjang aliran sungai Kapuas dan Melawi, pembukaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan sumberdaya kahutan, aktivitas pemukiman, aktifitas industri kecil (pabrik tahu, tempe), pembukaan lahan, ternak, hotel rumah sakit serta perluasan jaringan infrastruktur.

Selain itu, limbah cair juga berpotensi sebagai pencemar lingkungan karena menyebabkan bau, mengandung nilai BOD dan COD serta padatan tersuspensi yang tinggi. Apabila limbah cair langsung dibuang ke sungai maka sebagian akan mengendap, terurai secara perlahan, mengkonsumsi oksigen terlarut, menimbulkan kekeruhan, mengeluarkan bau yang sangat tajam dan dapat merusak daerah pembiakan ikan.

2. Kemerosotan Sumber Daya Hayati

Meningkatnya aktivitas dibidang pertanian, pertambangan, pengembangan areal pemukiman dan perluasan jaringan infrastruktur menyebabkan beberapa masalah terhadap sumberdaya hayati seperti :

1. Penebangan hutan dengan sistem "tebang butuh" bukan tebang pilih, yang menyebabkan kerusakan habitat dan penurunan populasi flora dan fauna tertentu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kelangkaan hingga kepunahan.
2. Kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan, aktivitas pertanian masyarakat dengan sistem bakar dapat mengakibatkan penurunan populasi flora dan fauna tertentu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kelangkaan hingga kepunahan.
3. Pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan dan pemukiman dapat menyebabkan berkurangnya habitat asli flora dan fauna. Sehingga wilayah untuk berkembangbiak semakin kecil.
4. Penangkapan ikan dengan sistem menyebarkan racun (Tuba) dapat menyebabkan punahnya jenis ikan tertentu, karena penangkapan ikan

dengan cara ini mengakibatkan bibit-bibit ikan dan jasad renik yang mendukung kehidupan ekosistem perairan juga ikut mati.

3. Permasalahan Sosial Ekonomi dan Budaya

Semakin meningkatnya tingkat sosial ekonomi masyarakat menyebabkan perluasan pemukiman semakin terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu sehingga pembangunan pemukiman pada kawasan yang padat penduduk harus dikelola lebih baik. Jika pembangunan yang dilakukan tanpa menggunakan perencanaan yang matang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas lingkungan yaitu mengganggu keseimbangan alam dan masalah ini harus dipikirkan secara matang, sebab perumahan dan lingkungan adalah dua sisi yang saling terkait. Dalam kaitannya dengan pemukiman, aktivitas pemukiman menghasilkan limbah berupa sampah yang merupakan salah satu faktor penyebab masalah lingkungan. Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan sudah tidak digunakan lagi. Permasalahan dalam pengolahan sampah di Kabupaten Sintang, antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan.
2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Pertumbuhan jumlah penduduk yang besar menimbulkan volume sampah semakin meningkat.
4. Rendahnya tingkat pelayanan akibat keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
5. Teknis pengelolaan sampah berwawasan lingkungan membutuhkan biaya yang tinggi.

Selain faktor-faktor pemukiman juga perlu diperhitungkan masalah keberadaan industri-industri, pasar serta pertokoan yang turut menentukan kualitas pemukiman penduduk. Hal tersebut seringkali menjadi masalah bagi penduduk yang bermukim di sekitarnya. Oleh sebab itu perlu adanya pemantauan lebih seksama dan intensif terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan.

4. Pemasalahan pengelolaan lingkungan hidup

Pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mutu kehidupan dan penghidupan, akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri mengalami banyak masalah dan kendala, antara lain :

- (a) Jumlah penduduk yang tinggi dengan sebaran yang tidak merata;
- (b) Ketersedian dan daya dukung sumberdaya alam yang terbatas;
- (c) Penguasaan teknologi yang tidak ramah lingkungan;
- (d) Kualitas sumberdaya manusia yang terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan;
- (e) Para stake holder pembangunan belum sepenuhnya bervisi pendekatan system dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan / lingkungan hidup.

Masalah-masalah lingkungan hidup yang diidentifikasi meliputi seluruh komponen lingkungan hidup (ekosistem) antara lain :

- (a) Komponen udara;
- (b) Komponen air (pencemaran air sungai, air tanah, sedimentasi pada danau/rawa dan pencemaran yang diakibatkan logam berat;

- (c) Komponen lahan (erosi tanah, degradasi kualitas lahan, kemerosotan daya dukung lingkungan, kerusakan lahan bekas pertambangan);
- (d) Komponen biotis hutan;
- (e) Komponen sosial kependudukan;
- (f) Komponen hukum atau perundang-undangan;
- (g) Rendahnya penguasaan teknologi ramah lingkungan dan;
- (h) Kerusakan lingkungan dampak dari bencana alam.

Berbagai permasalahan lingkungan yang telah diuraikan diatas, merupakan dampak nyata dari pelaksanaan pembangunan yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi masyarakat dalam upaya percepatan peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup mempunyai permasalahan utama yaitu :

- a. Jumlah Obyek pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dan wilayah yang luas
- b. Jumlah Tenaga Ahli Lingkungan Hidup yang belum memadai

Dengan beban kerja bidang lingkungan hidup yang semakin hari semakin upgrade, hal ini tidak didukung dengan tenaga ahli yang memadai dalam penanganan pekerjaan bidang lingkungan hidup

- c. Keterbatasan anggaran

Pada Tahun Anggaran 2019 anggaran untuk bidang lingkungan hidup hanya Rp.24.115.048.552,-

- d. Belum Optimalnya penghimpunan data dan informasi dalam rangka penyusunan Laporan Hasil Pekerjaan bidang lingkungan hidup.
- e. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai dalam pengektifan pekerjaan.
- f. Belum optimalnya mekanisme pekerjaan

- g. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
- h. Lokasi obyek Pekerjaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sintang.
- i. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan program yang akan dicapai.

Rencana strategis juga berguna sebagai pedoman atau acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI dan MISI, Tujuan dan Sasaran

a) VISI

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang adalah, ***“Terwujudnya Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Yang Semakin Hijau, Bersih, Indah Dan Lestari “***

Rumusan visi di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

2. Hijau artinya suatu kondisi yang ditandai oleh pepohonan rindang yang tumbuh dan terpelihara dimana-mana.
3. Bersih artinya disamping pengelolaan sampah, kotoran dan limbah secara benar juga indah dipandang mata.
4. Indah artinya lingkungan yang tertata rapi dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup seperti dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang.
5. Lestari disini juga mengandung arti tetap terjaganya lingkungan hidup sebagai daya tampung dan daya dukung makhluk hidup khususnya masyarakat Kabupaten Sintang.

a) MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta tugas pokok dan fungsinya telah merumuskan dan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas pelayanan melalui perencanaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya (manusia, peralatan, pendanaan, bahan dan metodologi)
2. Mewujudkan koordinasi, fasilitas, pembinaan, pemberdayaan, pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan
3. Mewujudkan penataan lingkungan yang baik dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penataan hukum lingkungan

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah:

T u j u a n	S a s a r a n
Peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumber daya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumber daya yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas lingkungan hidup Daerah Kabupaten Sintang

Misi Ke dua : “Mewujudkan koordinasi, fasilitas, pembinaan, pemberdayaan, pelestarian sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan”

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah:

T u j u a n	S a s a r a n
1. Mengendalikan pencemaran lingkungan. 2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan	1. Penurunan beban pencemaran lingkungan. 2. Penurunan laju kerusakan lingkungan dan pelestarian

pengendalian kerusakan lingkungan	sumber daya alam.
-----------------------------------	-------------------

Misi Ke tiga : “Mewujudkan penataan lingkungan yang baik dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penataan hukum lingkungan”

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah:

T u j u a n	S a s a r a n
1. Pengaturan pemanfaatan lingkungan melalui pendekatan tata ruang dan pengkajian dampak lingkungan	1. Terintegrasinya dan diterapkannya pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan	2. Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan.

Misi Ke empat : “Mewujudkan kapasitas kelembagaan, penelitian dan pengembangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”

Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tersebut di atas adalah:

T u j u a n	S a s a r a n
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola, perlindungan, penelitian dan pengembangan lingkungan hidup.	1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

3. Program

Adapun program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
7. Program Penegakan Hukum Lingkungan
8. Program Pengembangan Areal Pemakaman
9. Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)
10. Program Penataan Makam Sebagai Fungsi Taman dan RTH
11. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
12. Program Pelindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
13. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
14. Program Pengembangan Sistem Penataan dan Penegakan Hukum
15. Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 - 2021

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan terget kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dokumen penetapan/perjanjian kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran. Ditingkat SKPD dokumen perjanjian kinerja di buat oleh Kepala SKPD, yang berjanji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran

strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD).

1. Perjanjian kinerja

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen perjanjian Kinerja adalah sebanyak 7 sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

Masing-masing sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang tahun 2019 selengkapnya dituangkan dalam formulir Perjanjian Kinerja di bawah ini:

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mewujudkan penataan lingkungan yang baik dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penataan hukum lingkungan hidup	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang menunjang pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1 Paket Peralatan Pembersih dan Paket Pembersih 13 Unit Gerobak Sorong (Arco)
		Tersedianya Kendaraan Operasional yang layak dan menunjang kinerja pengelolaan persampahan	5 unit kendaraan roda 3 yang di pelihara 2 unit kendaraan roda 4 yang di pelihara 13 unit kendaraan roda 6 yang di pelihara 2 unit alat berat yang di pelihara
		Terlaksananya pengelolaan kebersihan kota dan terlaksananya pelayanan penarikan retribusi kebersihan/persampahan yang dapat menunjang pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1 Kegiatan dimana jumlah luasan lingkungan dalam kota diluar jangkauan PHL yang terpelihara
		Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang dapat menunjang kinerja pengelolaan persampahan	2 unit Bank Sampah sebagai sumber untuk pengelolaan sampah 1 Unit kendaraan pengangkut sampah untuk meningkatkan kualitas pelayanan persampahan

		Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1 Paket Belanja Modal Pembuatan Parit dan Guludan TPA Sepauk Belanja Modal Pembuatan Landasan Terminal Pembuatan Sampah di TPA Tempunak
		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan di TPA	1 Paket Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor 1 Paket Belanja Pupuk 1 Paket Belanja Modal Pengadaan Tanah Penimbun Barang 1 Buah Belanja Modal Pembuatan Plang nama TPA
		Terlaksananya Koordinasi antara SKPD terkait serta masyarakat dalam rangka mensukseskan program adipura	1 Kegiatan Penghargaan Adipura
		Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai di 11 Kecamatan	11 Kecamatan hasil pemantauan kualitas air sungai
		Kadar Konsentrasi dan kondisi sample lingkungan	1 kegiatan hasil sample lingkungan yang dianalisa di Laboratorium Lingkungan
		Mempermudah pemrakarsa / perusahaan dalam mengajukan AMDAL untuk rencana usagha/kegiatan	3 Dokumen Penilaian AMDAL secara benar dan valid oleh Komisi Penilaian AMDAL Kab. Sintang
		Laporan tentang tingkat ketaatan Badan Usaha terhadap peraturan di Bidang Lingkungan	14 Kecamatan Pengawasan pada Kegiatan Usaha yang telah memiliki Izin Lingkungan
		Tercapainya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	14 Kecamatan Pengawasan pada kegiatan usaha yang telah memiliki Izin Lingkungan
		Tersedianya Buku / Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Kabupaten Sintang Tahun 2019	4 Dokumen / Buku yang dibuat

		Pemrakarsa dapat melaksanakan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan sesuai dengan dokumen UKL-UPL dan AMDAL	75 % Data akurat dengan pelaksanaan SPPL, UKL-UPL dan AMDAL oleh 6 pemrakarsa usaha/kegiatan
		Terlaksananya Pembangunan Konservasi Tanah dan Air di Kabupaten Sintang	77 Paket Jumlah Sumur Resapan 11 Paket Pembuatan Embung 5 Paket Pembuatan Pengendali Jurang
		Terselenggaranya pemilihan calon Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Mandiri Terselenggaranya program pembinaan terhadap calon sekolah Adiwiyata di Kabupaten Sintang	5 Sekolah Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Mandiri 5 calon Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Mandiri
		Tersusunnya Buku dan Laporan Kegiatan DLH	9 Dokumen Laporan DLH
		Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	4 Kecamatan Sosialisasi tentang kesadaran masyarakat terhadap Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
		Terlaksananya Penerapan Agroforestry DHB-SDA-DR	2.800 Kg Bantuan Pupuk PMLT 700 Liter Bantuan Hebrisida 280.700 Batang Penanaman Bibit Tanaman Agroforestry
		Tersusunnya Rancangan Teknis kegiatan Agroforestry di Kabupaten Sintang	20 Dokuemn Rancangan Teknis Kegiatan Agroforestry di Kabupaten Sintang
		Tersedianya Pengelolaan RTH yang menunjang Keindahan Kota Sintang	1 Kegiatan Pengelolaan RTH
		Tertatanya taman-taman kota yang dapat menunjang Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sintang	1 Paket Tanaman yang dipelihara

		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	12 Jenis Peralatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 5 Buah Kendaraan Bermotor Roda Dua
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemakaman yang dapat menunjang Areal Pemakaman	8 Paket Penata Pagar Makam 8 Paket Pagar Makam yang dibangun
		Tersedianya Peralatan Pemeliharaan Pemakaman serta tercapainya Pemeliharaan Pemakaman Dalam kota Sintang	17 Jenis Jumlah Peralatan untuk Pemeliharaan yang tersedia 1 Kegiatan Pemeliharaan yang dilakukan
2	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	tersedianya jasa surat menyurat untuk pelayanan administrasi perkantoran	30 lembar materai 3000 200 lembar materai 6000
		tersedianya jasa telepon, listrik, faximili dan internet yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan Jasa Komunikasi/telepon 12 bulan Listrik 12 bulan Internet
		Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan DLH	2 Jenis Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Terwujudnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	51 unit belanja pajak kendaraan roda 2,3,4 dan 6 17 unit jumlah KIR kendaraan roda 4 dan 6
		Tersedianya jasa administrasi keuangan untuk pelayanan administrasi perkantoran	6 Buku Cek 436 buah Materai 6000 2 orang Pulsa CMS
		Tersedianya ATK yang disediakan dapat menunjang pelayanan perkantoran	33 Jenis Jumlah ATK 5 Jenis Jumlah Peralatan Komputer
		Tersedianya barang cetakan yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	21 Jenis Barang Cetakan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	7 Jenis fasilitas listrik dan penerangan
		Tersedianya bahan bacaan surat kabar sebagai sarana Informasi umum	3 Jenis Surat Kabar

	pegawai DLH kab. Sintang	
	Tersedianya makanan dan minuman yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	465 kotak Nasi 870 Kotak Snack
	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi yang dapat menunjang pelayanan administrasi perkantoran	3 Bidang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
	Terselenggaranya rapat koordinasi dan pembinaan kedalam daerah	114 kali pembinaan ke dalam daerah 13 Kecamatan pembinaan
	Tersedianya jasa Teknis/Administrasi Perkantoran, Petugas Pertamanan, dan Petugas Kebersihan yang dapat menunjang Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	30 orang Jasa Teknis/Administrasi Perkantoran 40 orang Petugas Pertamanan 235 orang Petugas Kebersihan
	Tersedianya BBM yang menunjang tugas pelayanan administrasi perkantoran	13.325 liter Bahan Bakar Minyak 3 Unit Pelumas Kendaraan Roda 4
	Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang kebersihan DLH	26 Jenis Peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia
	Tercapainya pekerjaan kantor yang memenuhi standar pelayanan	1 unit laptop
	Terwujudnya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	17 Unit Jasa Service Kendaraan roda 2, 3, 4 dan 6 17 Unit pergantian suku cadang roda 2,3,4 dan 6 Pelumas roda 4 dan 6 1 Paket Belanja Pemeliharaan dan Mesin untuk Suku Cadang Mesin Potong Rumput dan Chain Saw 1 Paket Belanja Service Kontainer Sampah
	Terwujudnya sarana dan prasarana Penunjang Kegiatan DLH	20 Unit Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dapat	15 Unit Pemeliharaan Komputer

		menunjang tugas aparatur	5 Unit Pemeliharaan Notebook 6 Unit Pemeliharaan Printer
		Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur dalam Penggunaan Pakaian Dinas	101 stell PDH 6 stell PSR 101 stell Pakaian Batik Tradisional
		Meningkatnya kemampuan Aparatur yang mengikuti Diklat yang dapat menunjang tugas dan fungsi aparatur	3 Orang aparatur yang mengikuti Diklat
		Terlaksananya Pelaporan Keuangan DLH Kabupaten Sintang	2 Dokumen Laporan Keuangan Semester DLH Kab. Sintang
		Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
		Terlaksananya Penyusunan Renja DLH	1 Dokumen Renja DLH
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DLH	1 DPA
		Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan Pelestarian Lingkungan	1 Kegiatan Peringatan Hari LH Sedunia
		Keikutsertaan DLH dalam Pameran Pembangunan	1 Kegiatan Pameran Pembangunan

2. Program dan Anggaran

Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 4.870.734.511	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 140.810.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 117.843.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 45.845.000,00	APBD

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	52.000.000,00	APBD
6	Program Pengembangan Kinerja Pengolaan Persampahan	Rp	2.179.949.900,00	APBD/DAK
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	419.940.569,00	APBD
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	4.000.000.000,00	DBHDR
9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	63.846.900,00	APBD
10	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Rp	6.414.836.900,00	DBHDR
11	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	496.441.800,00	APBD
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Rp	2.311.325.194,00	DBHDR
13	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp	1.960.000.000,00	APBD
14	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	Rp	182.835.970,00	APBD
TOTAL		Rp	23.256.409.744,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih

independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang digunakan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcome yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Range	Penilaian
85 s.d 100	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu menggunakan "Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu:

Nilai Tengah	Penilaian
92,5%	Sangat Berhasil
77,5%	Berhasil
62,5%	Cukup Berhasil
27,5%	Tidak Berhasil

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari Hasil Perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.

$\text{Rumus} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori} \times \text{Mean Kategorinya})}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$
--

b. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*Outcome*).

Pengukuran Kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir pengukuran kinerja (PK).

Indikator Input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator Input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besaran dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM.

Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan, seperti jumlah laporan hasil bimbingan teknis, LKjIP, Laporan Keuangan, Laporan Hasil Evaluasi, Audit yang diterbitkan dan sebagainya.

Indikator Outcome adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu output, antara lain prosentase peningkatan jumlah temuan yang ditindaklanjuti atau prosentase meningkatnya pelayanan pengaduan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumber daya yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	100%			
2	Penurunan beban pencemaran lingkungan		80 %		
3	Penurunan laju kerusakan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam			70 %	
4	Terintegrasinya dan diterapkannya pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan		78 %		
5	Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan		82 %		
6	Meningkatnya Kapasitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		80 %		

Dari 3 sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sangat berhasil	5	Sasaran	(71,42%)
- Berhasil	-	Sasaran	(- %)
- Cukup Berhasil	1	Sasaran	(14,28 %)
- Tidak Berhasil	<u>1</u>	<u>Sasaran</u>	<u>(14,28 %)</u>
Jumlah	7	Sasaran	(100 %)

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada bagian evaluasi kinerja berikut ini:

REALISASI ANGGARAN

1) Laporan Realisasi Anggaran dan Penjelasannya

Pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi (Rp.)	Sisa Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.00.5.1] Belanja Tidak Langsung				
5110101	Gaji pokok PNS/uang representasi	3.169.045.428,00	3.119.576.240,00	49.469.188,00
5110102	Tunjangan keluarga	342.285.642,00	303.193.678,00	39.091.964,00
5110103	Tunjangan jabatan	209.084.820,00	192.290.000,00	16.794.820,00
5110105	Tunjangan fungsional umum	159.652.963,00	122.175.000,00	37.477.963,00
5110106	Tunjangan beras	223.370.203,00	177.646.260,00	45.723.943,00
5110107	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	7.000.000,00	3.168.314,00	3.831.686,00
5110108	Pembulatan gaji	170.321,00	53.932,00	116.389,00
5110109	Jaminan Kesehatan	128.264.065,00	87.966.366,00	40.297.699,00
5110122	Jaminan Kematian	28.265.619,00	16.093.657,00	12.171.962,00
5110123	Jaminan Keselamatan Kerja	17.886.421,00	6.413.176,00	11.473.245,00
5110201	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1.325.025.000,00	1.190.403.000,00	134.622.000,00
5110601	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.714.286,00	13.125.000,00	12.589.286,00
Sub Jumlah		5.635.764.768,00	5.232.104.623,00	403.660.145,00
0.10	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
[DPPA - 0.1.04.0.2.05.01.00.20.006.5.2] Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman - Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00
5210102	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
5210104	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	5.420.170,00	5.420.170,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	3.349.830,00	3.349.830,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.440.000,00	22.440.000,00	0,00
5222102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00
5222202	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.719.000.000,00	1.715.832.000,00	3.168.000,00
5232729	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pagar/Gapura/Plang Nama Instansi	105.280.000,00	104.983.000,00	297.000,00
Sub Jumlah		1.910.000.000,00	1.906.535.000,00	3.465.000,00
[DPPA - 0.1.04.0.2.05.01.00.20.007.5.2] Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman - Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.542.800,00	1.542.800,00	0,00
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00
5220105	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	4.478.040,00	4.474.500,00	3.540,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.524.000,00	2.524.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	17.465.160,00	17.355.000,00	110.160,00
Sub Jumlah		50.000.000,00	49.886.300,00	113.700,00
0.20	LINGKUNGAN HIDUP			

[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.001.5.2] Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa surat menyurat				
5220103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.290.000,00	1.284.000,00	6.000,00
Sub Jumlah		1.290.000,00	1.284.000,00	6.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.002.5.2] Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
5220301	Belanja telepon/faksimili/Radio	600.000,00	0,00	600.000,00
5220303	Belanja Listrik	116.400.000,00	109.188.998,00	7.211.002,00
5220306	Belanja internet/bandwitch	20.400.000,00	19.251.900,00	1.148.100,00
Sub Jumlah		137.400.000,00	128.440.898,00	8.959.102,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.003.5.2] Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				
5220108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00
5231406	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.750.000,00	2.000.000,00	750.000,00
5231407	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
Sub Jumlah		19.400.000,00	18.650.000,00	750.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.006.5.2] Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				
5220504	Belanja KIR	2.554.000,00	2.162.300,00	391.700,00
5220505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	55.350.000,00	14.419.000,00	40.931.000,00
Sub Jumlah		57.904.000,00	16.581.300,00	41.322.700,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.007.5.2] Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa administrasi keuangan				
5220103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	4.866.000,00	4.866.000,00	0,00
5220309	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	495.000,00	153.000,00	342.000,00
5220332	Belanja Jasa Transaksi Perbankan	3.750.000,00	3.000.000,00	750.000,00
Sub Jumlah		9.111.000,00	8.019.000,00	1.092.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.010.5.2] Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan alat tulis kantor				
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	21.396.581,00	21.395.850,00	731,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	16.307.000,00	16.235.500,00	71.500,00
Sub Jumlah		37.703.581,00	37.631.350,00	72.231,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.011.5.2] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
5220601	Belanja Penggandaan	8.478.030,00	8.415.000,00	63.030,00
5220602	Belanja Penjilidan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak dan Barang Catakan	10.687.130,00	10.687.130,00	0,00
Sub Jumlah		20.440.160,00	20.377.130,00	63.030,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.012.5.2] Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				
5220102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	9.593.000,00	9.523.000,00	70.000,00
Sub Jumlah		9.593.000,00	9.523.000,00	70.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.015.5.2] Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				
5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.200.000,00	3.360.000,00	840.000,00
Sub Jumlah		4.200.000,00	3.360.000,00	840.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.017.5.2] Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makanan dan minuman				
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	24.978.000,00	24.952.200,00	25.800,00
Sub Jumlah		24.978.000,00	24.952.200,00	25.800,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.018.5.2] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				
5220105	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	3.326.468,00	1.473.532,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	504.300.000,00	504.210.354,00	89.646,00
Sub Jumlah		509.100.000,00	507.536.822,00	1.563.178,00

[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.019.5.2] Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah				
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	245.305.000,00	245.170.000,00	135.000,00
Sub Jumlah		245.305.000,00	245.170.000,00	135.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.020.5.2] Penyediaan tenaga kontrak - Penyediaan tenaga kontrak				
5210201	Gaji Pegawai Tidak Tetap	3.283.800.000,00	3.277.800.000,00	6.000.000,00
5210301	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	402.024.000,00	358.471.400,00	43.552.600,00
5210302	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	22.692.000,00	7.104.240,00	15.587.760,00
5210303	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	14.640.000,00	8.880.300,00	5.759.700,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	5.498.560,00	5.498.560,00	0,00
5220103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	4.526.500,00	4.526.500,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	990.000,00	990.000,00	0,00
Sub Jumlah		3.737.831.060,00	3.666.931.000,00	70.900.060,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.021.5.2] Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas - Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas				
5220503	Belanja Bahan Pelumas	6.900.000,00	6.880.000,00	20.000,00
Sub Jumlah		106.135.200,00	105.824.546,00	310.654,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.01.022.5.2] Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor				
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16.169.300,00	14.658.100,00	1.511.200,00
5231407	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
Sub Jumlah		18.469.300,00	16.958.100,00	1.511.200,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.02.010.5.2] Pengadaan mebeleur -				
5231301	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5231303	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
Sub Jumlah		31.600.000,00	31.600.000,00	0,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.02.011.5.2] Pengadaan perangkat komputer dan printer - Pengadaan perangkat komputer dan printer				
5231203	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	8.900.000,00	8.474.000,00	426.000,00
Sub Jumlah		8.900.000,00	8.474.000,00	426.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.02.024.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				
5220501	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.000.000,00	37.980.000,00	20.000,00
5220503	Belanja Bahan Pelumas	2.000.000,00	1.990.000,00	10.000,00
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.180.000,00	26.155.000,00	25.000,00
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	30.000.000,00	29.969.000,00	31.000,00
Sub Jumlah		106.180.000,00	106.094.000,00	86.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.02.028.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.115.000,00	14.030.000,00	85.000,00
Sub Jumlah		14.115.000,00	14.030.000,00	85.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.02.030.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer - Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer				
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.615.000,00	11.605.000,00	10.000,00
Sub Jumlah		11.615.000,00	11.605.000,00	10.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.03.002.5.2] Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				
5221204	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	77.770.000,00	77.770.000,00	0,00
5221206	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	25.553.000,00	25.553.000,00	0,00
Sub Jumlah		117.843.000,00	117.843.000,00	0,00

[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.05.001.5.2] Pendidikan dan pelatihan formal - Pendidikan dan pelatihan formal				
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.880.000,00	39.971.454,00	7.908.546,00
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	17.000.000,00	1.000.000,00
Sub Jumlah		65.880.000,00	56.971.454,00	8.908.546,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.06.002.5.2] Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	989.700,00	989.700,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	998.000,00	998.000,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.840.500,00	2.840.500,00	0,00
Sub Jumlah		4.828.200,00	4.828.200,00	0,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.06.005.5.2] Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.335.500,00	1.335.500,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	3.833.500,00	3.833.500,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	426.000,00	426.000,00	0,00
5220602	Belanja Penjilidan	550.000,00	550.000,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah		6.145.000,00	6.145.000,00	0,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.06.010.5.2] Penyusunan rencana kerja perangkat daerah				
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	6.132.830,00	5.517.130,00	615.700,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	2.893.770,00	2.893.770,00	0,00
5220602	Belanja Penjilidan	825.000,00	825.000,00	0,00
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah		14.511.600,00	13.895.900,00	615.700,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.06.011.5.2] Penyusunan RKA SKPD				
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.184.500,00	2.184.500,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	924.000,00	924.000,00	0,00
5220602	Belanja Penjilidan	330.000,00	330.000,00	0,00
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00
Sub Jumlah		11.183.500,00	11.183.500,00	0,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.15.002.5.2] Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	5.220.000,00	1.280.000,00
5210104	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00
5210107	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	0,00	0,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.996.500,00	1.996.500,00	0,00
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	122.430.000,00	122.260.000,00	170.000,00
5220117	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	7.150.000,00	7.143.500,00	6.500,00
5220601	Belanja Penggandaan	990.000,00	900.000,00	90.000,00
5220602	Belanja Penjilidan	2.750.000,00	750.000,00	2.000.000,00
5231005	Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00
Sub Jumlah		151.816.500,00	148.170.000,00	3.646.500,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.15.004.5.2] Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan				

5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.590.000,00	4.000.000,00	1.590.000,00
5210102	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
5210104	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	2.480.000,00	1.860.000,00	620.000,00
5210107	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.355.230,00	1.355.230,00	0,00
5220105	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	624.579.700,00	623.723.796,00	855.904,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.370.500,00	2.370.500,00	0,00
5220317	Belanja Jasa Tenaga Tukang	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00
5220501	Belanja Jasa Service	39.539.800,00	39.494.500,00	45.300,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	159.550.000,00	159.075.000,00	475.000,00
5220503	Belanja Bahan Pelumas	45.800.000,00	44.585.000,00	1.215.000,00
5220601	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
5220602	Belanja Penjilidan	550.000,00	550.000,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00
Sub Jumlah		967.931.230,00	963.130.026,00	4.801.204,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.15.016.5.2] Pengelolaan kebersihan kota - Pengelolaan kebersihan kota				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.038.800,00	2.038.800,00	0,00
5220108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	5.304.000,00	5.304.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	106.855.000,00	106.445.000,00	410.000,00
Sub Jumlah		127.167.800,00	126.757.800,00	410.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.15.020.5.2] Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK) - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK)				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5220601	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00
5222102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5222103	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.540.000,00	2.100.000,00	6.440.000,00
5230313	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	420.000.000,00	0,00	420.000.000,00
5232701	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	396.000.000,00	395.833.000,00	167.000,00
Sub Jumlah		842.540.000,00	406.723.000,00	435.817.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.15.201.5.2] Pengadaan Sarana dan Prasana Pengelolaan Persampahan				
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.474.000,00	1.474.000,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	990.000,00	900.000,00	90.000,00
5220602	Belanja Penjilidan	2.750.000,00	2.250.000,00	500.000,00
5232340	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	200.000.000,00	199.987.101,00	12.899,00
5232730	Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Pembuangan Sampah	200.000.000,00	199.384.000,00	616.000,00
Sub Jumlah		405.214.000,00	403.995.101,00	1.218.899,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.15.202.5.2] Pemeliharaan sarana dan prasarana TPA				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00
5220117	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	1.550.000,00	750.000,00	800.000,00
5220208	Belanja Pupuk	2.377.360,00	2.377.360,00	0,00

5220601	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00
5220602	Belanja Penjilidan	550.000,00	550.000,00	0,00
5230136	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	57.350.010,00	57.197.800,00	152.210,00
5232729	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pagar/Gapura/Plang Nama Instansi	7.500.000,00	4.200.000,00	3.300.000,00
Sub Jumlah		75.680.370,00	71.428.160,00	4.252.210,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.16.001.5.2] Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.184.280,00	1.184.280,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	888.500,00	888.500,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	1.129.920,00	1.129.920,00	0,00
5220602	Belanja Penjilidan	258.750,00	258.750,00	0,00
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.235.000,00	19.235.000,00	0,00
Sub Jumlah		35.003.450,00	35.003.450,00	0,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.16.003.5.2] Pemantauan Kualitas Lingkungan				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.892.329,00	1.892.329,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	264.211,00	264.211,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	1.191.960,00	1.191.960,00	0,00
5220602	Belanja Penjilidan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.966.500,00	1.966.500,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.810.000,00	85.405.000,00	405.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.815.000,00	26.295.000,00	1.520.000,00
Sub Jumlah		120.315.000,00	118.390.000,00	1.925.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.16.017.5.2] Penunjang layanan laboratorium				
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.453.000,00	2.453.000,00	0,00
5220115	Belanja BAKHP (Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai)	11.463.750,00	11.463.750,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.580.000,00	34.535.000,00	45.000,00
Sub Jumlah		50.001.750,00	49.956.750,00	45.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.16.018.5.2] Penunjang komisi penilai AMDAL				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	3.351.890,00	3.351.890,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	792.000,00	729.000,00	63.000,00
5220601	Belanja Penggandaan	5.031.510,00	5.031.510,00	0,00
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.015.000,00	23.715.000,00	300.000,00
Sub Jumlah		40.001.400,00	39.638.400,00	363.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.16.019.5.2] Pengawasan kualitas lingkungan daerah investasi				
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.371.930,00	2.371.930,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	1.544.070,00	1.543.870,00	200,00
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	874.000,00	874.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.705.000,00	41.140.000,00	1.565.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.505.000,00	17.371.383,00	133.617,00
Sub Jumlah		65.000.000,00	63.301.183,00	1.698.817,00

[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.16.020.5.2] Pelayanan, pengaduan kasus dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	757.200,00	757.200,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	956.500,00	956.500,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	594.000,00	594.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.335.000,00	33.335.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.460.000,00	25.411.500,00	48.500,00
Sub Jumlah		66.602.700,00	63.804.200,00	2.798.500,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.16.022.5.2] Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD)				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	637.739,00	637.739,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	23.430,00	23.430,00	0,00
5220602	Belanja Penjilidan	220.000,00	220.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.995.000,00	51.055.000,00	940.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00
Sub Jumlah		66.666.169,00	65.726.169,00	940.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.16.043.5.2] Monitoring, evaluasi dan pelaporan UKL-UPL dan AMDAL				
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	998.100,00	998.100,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	627.000,00	627.000,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.140.000,00	23.460.000,00	680.000,00
Sub Jumlah		26.665.100,00	25.985.100,00	680.000,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.17.040.5.2] Permbangunan Konservasi Tanah dan Air				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00
5210104	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
5210205	Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	4.282.850,00	4.282.850,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.329.500,00	2.329.500,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	1.861.500,00	1.861.200,00	300,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.335.000,00	67.280.000,00	55.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.990.000,00	29.797.891,00	20.192.109,00
5222102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	97.130.000,00	96.880.000,00	250.000,00
5222103	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	58.791.150,00	58.590.000,00	201.150,00
5232731	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya	3.700.500.000,00	3.497.077.413,00	203.422.587,00
Sub Jumlah		4.000.000.000,00	3.775.878.854,00	224.121.146,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.19.001.5.2] Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.775.000,00	4.545.000,00	230.000,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	807.050,00	807.050,00	0,00
5220209	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	1.422.750,00	1.422.750,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	613.800,00	613.800,00	0,00
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.573.200,00	1.573.200,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.573.200,00	1.573.200,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.235.000,00	18.785.000,00	450.000,00
Sub Jumlah		30.000.000,00	29.320.000,00	680.000,00

[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.19.009.5.2] Penyusunan pelaporan kegiatan dinas lingkungan hidup				
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	12.228.200,00	12.228.200,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	7.003.300,00	7.003.300,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00
5220602	Belanja Penjilidan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2.185.000,00	2.147.500,00	37.500,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00
Sub Jumlah		37.756.500,00	37.719.000,00	37.500,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.22.007.5.2] Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00
5210102	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
5210107	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	13.370.000,00	13.370.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	715.786,00	715.786,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00
5220319	Belanja Jasa Mobilisasi	128.180.412,00	0,00	128.180.412,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.399.996,00	0,00	29.399.996,00
5222202	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.962.654.000,00	0,00	1.962.654.000,00
5230305	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	168.500.000,00	168.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		2.311.325.194,00	188.780.786,00	2.122.544.408,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.22.008.5.2] Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan				
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	902.900,00	902.900,00	0,00
5220310	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	596.000,00	596.000,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.590.000,00	35.980.000,00	610.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.110.000,00	15.589.728,00	27.520.272,00
5222501	Belanja Transportasi	43.275.000,00	43.275.000,00	0,00
Sub Jumlah		152.478.900,00	124.348.628,00	28.130.272,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.22.009.5.2] Penerapan Agroforestry -				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	49.610.000,00	0,00	49.610.000,00
5210102	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
5210107	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
5210112	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	4.083.900,00	0,00	4.083.900,00
5220103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	0,00	240.000,00
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.683.200,00	0,00	1.683.200,00
5220116	Belanja bahan/peralatan pertanian	0,00	0,00	0,00
5220201	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	0,00	0,00	0,00
5220202	Belanja bahan/bibit tanaman	0,00	0,00	0,00
5220208	Belanja Pupuk	0,00	0,00	0,00
5220317	Belanja Jasa Tenaga Tukang	0,00	0,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
5220602	Belanja Penjilidan	975.000,00	0,00	975.000,00

5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	12.320.000,00	0,00	12.320.000,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.620.000,00	0,00	18.620.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	360.140.000,00	0,00	360.140.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79.925.000,00	0,00	79.925.000,00
5222202	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	3.554.270.500,00	0,00	3.554.270.500,00
5222402	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	1.769.900.000,00	0,00	1.769.900.000,00
Sub Jumlah		5.871.197.600,00	0,00	5.871.197.600,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.22.010.5.2] Penyusunan rancangan teknis agroforestry				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00
5210104	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
5210107	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	3.052.400,00	3.052.400,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	913.000,00	913.000,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
5220602	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	110.570.000,00	109.710.000,00	860.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.665.000,00	53.525.500,00	139.500,00
5222102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	66.000.000,00	134.000.000,00
Sub Jumlah		391.160.400,00	254.900.900,00	136.259.500,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.24.006.5.2] Pemeliharaan RTH				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
5210104	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	0,00	0,00	0,00
5210112	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.889.050,00	2.889.050,00	0,00
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.874.000,00	10.874.000,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.561.500,00	1.561.500,00	0,00
5220202	Belanja bahan/bibit tanaman	92.064.750,00	91.979.472,00	85.278,00
5220208	Belanja Pupuk	27.025.000,00	26.962.000,00	63.000,00
5220601	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.117.500,00	5.071.500,00	46.000,00
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	120.000.000,00	119.886.000,00	114.000,00
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	15.000.000,00	14.996.000,00	4.000,00
5231403	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Sub Jumlah		296.041.800,00	295.729.522,00	312.278,00
[DPPA - 0.2.05.0.2.05.01.00.24.015.5.2] Penataan taman dalam kota				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	3.867.100,00	3.867.100,00	0,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.734.500,00	2.734.500,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	2.798.400,00	2.798.400,00	0,00
5220602	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5232731	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya	497.985.118,00	497.228.000,00	757.118,00
Sub Jumlah		509.985.118,00	507.728.000,00	2.257.118,00

0.40	PEMERINTAHAN UMUM			
[DPPA - 0.4.05.0.2.05.01.00.24.011.5.2] Peringatan Hari Lingkungan Hidup				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	6.970.000,00	6.970.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.567.470,00	1.567.470,00	0,00
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.946.000,00	4.946.000,00	0,00
5220108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5220202	Belanja bahan/bibit tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5220209	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
5220602	Belanja Penjilidan	550.000,00	550.000,00	0,00
5221001	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	400.000,00	0,00
5221005	Belanja Sewa Tenda	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
5221007	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.555.000,00	6.555.000,00	0,00
5221404	Belanja pakaian olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.380.000,00	49.290.000,00	90.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.850.000,00	5.360.000,00	2.490.000,00
Sub Jumlah		140.498.470,00	137.918.470,00	2.580.000,00
[DPPA - 0.4.05.0.2.05.01.00.24.018.5.2] Pameran pembangunan				
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.335.000,00	5.335.000,00	0,00
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	529.100,00	529.100,00	0,00
5220105	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	880.000,00	832.000,00	48.000,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	902.000,00	902.000,00	0,00
5220201	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	18.000.000,00	17.989.000,00	11.000,00
5220209	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	7.818.900,00	7.809.000,00	9.900,00
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00
5220317	Belanja Jasa Tenaga Tukang	960.000,00	960.000,00	0,00
5220601	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00
5220602	Belanja Penjilidan	82.500,00	82.500,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00
Sub Jumlah		42.337.500,00	42.268.600,00	68.900,00
Jumlah		29.750.813.320,00	20.359.037.422,00	9.391.775.898,00

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2019 secara umum dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta dana yang dipergunakan selama tahun 2019.

Akhirnya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan acuan atau bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang sehingga dapat lebih ditingkatkan.

Sebagai sebuah dokumen evaluasi Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang Tahun 2019, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas lingkungan hidup Kabupaten Sintang satu tahun ke depan.